

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yaitu pengumpulan data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, kemudian dilakukan perhitungan selanjutnya data hasil perhitungan atau pengukuran tersebut diproses dengan cara dianalisis.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah kantor Pemerintah Kabupaten Gresik yang berlokasi di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik.

3.3 Data dan Jenis Data

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan adalah ringkasan laporan realisasi anggaran (APBD) Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Data ini diambil dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan pemerintah pusat.

b. Data Kualitatif

Yaitu jenis data yang dapat di ukur secara tidak langsung dan bukan berupa angka atau bilangan melainkan berupa data yang diperoleh dari literatur terkait yang dibutuhkan dalam penulisan ini, seperti struktur organisasi, sejarah Pemerintah Kabupaten Gresik, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran (APBD) Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang diambil dari catatan atau arsip yang ada di lokasi penelitian yang selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3.5 Definisi Operasional Variabel

1. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2008:330). Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, maka perlu adanya suatu pengukuran kinerja atas pengelolaan keuangan tersebut sebagai alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi sektor publik (Bastian, 2006:274-275) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
2. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi (Moeheriono, 2010:61). Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik perlu melakukan pengukuran kinerja atas keuangan yang dikelolaknya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *value for money*, yang tidak hanya mengukur tingkat input

tetapi juga memperhatikan output dan *outcome*-nya, yang medasarkan pada tiga elemen utama yaitu:

- a. Ekonomis, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
- b. Efisien, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah rendahnya.
- c. Efektifitas, hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

3.6 Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, yaitu suatu cara untuk analisis data yang bersifat kuantitatif dengan cara perhitungan ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Menurut Mardiasmo (2009:133-134), perhitungan atau pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektifitas adalah sebagai berikut :

1) Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan perbandingan antara input dan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dengan kata lain, ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa (input) dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk pengukuran ekonomi :

- a. Apakah realisasi belanja rutin lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik?
- b. Apakah realisasi belanja modal lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik?
- c. Apakah realisasi total belanja lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik?

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Pengeluaran yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik. Adapun kriteria ekonomis penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Andriani (2012:29) dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis berimbang
Lebih dari 100%	Tidak ekonomis

Sumber : Mohammad Mahsun, 2006

2) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Realisasi belanja yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Andriani (2012:31) dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak efisien
Sama dengan 100%	Efisien berimbang
Kurang dari 100%	Sangat efisien

Sumber : Mohammad Mahsun, 2006

3) Pengukuran Efektifitas

Efektifitas adalah hubungan antara output dan *outcome*, dimana efektifitas mengukur tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Andriani (2012:32) dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100%	Tidak efektif
Sama dengan 100%	Efektif berimbang
Lebih dari 100%	Efektif

Sumber : Mohammad Mahsun, 2006